



BUPATI HULU SUNGAI UTARA

RINGKASAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (RLPPD) TAHUN ANGGARAN 2019 KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

Sesuai dengan ketentuan Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa Kepala Daerah kepala daerah wajib menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, laporan keterangan pertanggungjawaban, dan ringkasan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah disampaikan kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) disampaikan kepada DPRD, dan Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (RLPPD) disampaikan kepada masyarakat. Penyampaian RLPPD sekaligus juga untuk menginformasikan kemajuan dan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah selama tahun 2019 kepada masyarakat sehingga diharapkan dapat memperoleh masukan dan saran guna peningkatan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di tahun-tahun yang akan datang.

Sesuai dengan RPJMD Kabupaten Hulu Sungai Utara, Visi Kabupaten Hulu Sungai Utara 2017 – 2022 adalah “Hulu Sungai Utara MANTAP” dimana ungkapan MANTAP merupakan akronim atau singkatan dari MAJU, MANDIRI, SEJAHTERA, AGAMIS, dan PRODUKTIF. Untuk mewujudkan visi tersebut di atas, maka misi yang diemban seluruh lapisan masyarakat dan pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara adalah : a. Menciptakan Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, dan Inovatif; b. Mewujudkan Sumberdaya Manusia yang Berdaya Saing dengan Ditopang Nilai-nilai Agamis dan Kultur Budaya Daerah; c. Menciptakan Kesejahteraan Masyarakat yang Berbasis Pengembangan Ekonomi dan Sumberdaya Lokal dengan Berlandaskan Potensi Daerah; d. Membangun Infrastruktur Daerah yang Terintegrasi dengan Sektor Pendidikan, Kesehatan dan Ekonomi Lokal; dan

e. Melaksanakan Pembangunan Secara Arif dengan Memperhatikan Kaidah Kelestarian Terhadap Lingkungan dan Sumberdaya Alam.

Capaian kinerja makro Kabupaten Hulu Sungai Utara pada tahun 2019 yang meliputi indeks pembangunan manusia, angka kemiskinan, angka pengangguran, pertumbuhan ekonomi, pendapatan perkapita dan ketimpangan pendapatan (gini ratio) dapat digambarkan sebagai berikut; Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Hulu Sungai Utara pada tahun 2019 adalah sebesar 65,49%. Pada kurun waktu dari tahun 2015 - 2019 IPM Kabupaten HSU terus mengalami peningkatan, dimana pada periode tersebut meningkat sebesar 3,00 % dan merupakan salah satu dari 3 (tiga) Kabupaten tercepat yang mengalami kemajuan peningkatan IPM. Kemajuan IPM ini terutama di dorong oleh sektor pendidikan. Angka kemiskinan di Kabupaten Hulu Sungai Utara pada periode tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 secara umum terjadi penurunan yang cukup signifikan, yaitu dari 7,07% pada tahun 2015 menjadi 6,50% di tahun 2019. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Hulu Sungai Utara tahun 2019 sebesar 5.54% dan berada di atas rata-rata pertumbuhan ekonomi Kalimantan Selatan yang pertumbuhannya sebesar 4.08%. Pendapatan perkapita penduduk Kab. HSU berdasarkan data terakhir adalah sebesar Rp.19.500.000,-. Angka Gini Ratio Kabupaten Hulu Sungai Utara berdasarkan angka BPS terakhir adalah 0,325%, di bawah Kalimantan Selatan yang sebesar 0,344. Angka ini termasuk dalam kategori ketimpangan sedang ($0,3 < G < 0,5$) yang mendekati rendah.

Di bidang pelayanan dasar yang meliputi pendidikan, kesehatan, Pekerjaan Umum dan penataan ruang, perumahan rakyat, trantibumlinmas dan sosial, capaian di tahun 2019 dapat digambarkan sebagai berikut; Di bidang pendidikan angka kelulusan di jenjang pendidikan SD/MI dan jenjang pendidikan SMP/MTs adalah 100%. Capaian di bidang kesehatan diantaranya adalah semua rumah sakit rujukan di Kabupaten HSU telah terakreditasi, persentase ibu hamil yang mendapatkan pelayanan ibu hamil adalah 100%, persentase ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan adalah 100%, persentase balita gizi buruk (*stunting*) yang mendapatkan perawatan / pelayanan kesehatan adalah 100%, persentase orang terduga TBC yang mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar adalah 100%, persentase penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD adalah 100%. Capaian di bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

diantaranya adalah panjang jalan kabupaten yang direhabilitasi/direkonstruksi adalah 95,75%, persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM di seluruh kabupaten adalah 88,27%, persentase rumah tangga bersanitasi adalah 88,96%, persentase rumah tangga pengguna air bersih adalah 88,27% dan tersedianya ruang terbuka hijau yang memadai. Capaian di bidang perumahan rakyat diantaranya adalah persentase Rumah Layak Huni (RLH) di Kabupaten Hulu Sungai Utara adalah mencapai 95,74%. Di bidang ketentraman dan ketertiban umum dan perlindungan masyarakat diantaranya adalah jumlah warga yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana adalah 9.129 orang dan secara umum kondisi keamanan serta ketertiban di Kabupaten Hulu Sungai Utara sepanjang tahun 2019 adalah sangat kondusif. Sedangkan capaian di bidang sosial adalah terpenuhinya kebutuhan dasar korban bencana alam dan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten.

Dalam pengelolaan keuangan daerah di tahun 2019, Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. Capaian WTP ini adalah capaian WTP keempat secara berturut-turut yang telah diraih Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Target dan realisasi belanja Tahun Anggaran 2019 diprioritaskan untuk mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan dasar yang sesuai dengan kewenangan, baik urusan wajib pelayanan dasar, urusan wajib bukan pelayanan dasar, urusan wajib dan urusan pilihan dan urusan pemerintahan fungsi penunjang. Realisasi penerimaan dan pengeluaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2019 digambarkan dalam tabel berikut :

Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	%
PENDAPATAN	1.224.200.343.803,24	1.289.016.741.122,45	105,29
PENDAPATAN ASLI DAERAH	123.291.641.278,24	141.471.379.477,45	114,75
Pendapatan Pajak Daerah	10.211.144.402,00	12.295.480.511,50	120,41
Hasil Retribusi Daerah	9.230.552.450,00	9.873.821.678,00	106,97
Hasil Pengel. Kekay. Daerah yg Dipisahkan	8.568.547.000,00	4.998.330.040,17	58,33
Lain-lain PAD yang Sah	95.281.397.426,24	114.303.747.247,78	119,96
DANA PERIMBANGAN	812.334.414.850,00	832.348.840.403,00	102,46
Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak	110.528.645.850,00	131.738.548.285,00	119,19
Dana Alokasi Umum	490.413.410.000,00	507.610.007.000,00	103,51
Dana Alokasi Khusus	211.392.359.000,00	193.000.285.118,00	91,30
LAIN-LAIN PAD YANG SAH	288.574.287.675,00	315.196.521.242,00	109,23
Pendapatan Hibah	20.118.600.000,00	29.492.659.000,00	146,59
Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi	60.000.810.675,00	77.248.985.242,00	128,75
Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	174.701.975.000,00	174.701.975.000,00	100,00
Dana Insentif Daerah	33.752.902.000,00	33.752.902.000,00	100,00

BELANJA	1.392.346.651.064,15	1.253.717.221.624,00	90,04
BELANJA TIDAK LANGSUNG	732.589.318.189,15	668.235.209.910,00	91,22
Belanja Pegawai	465.413.167.794,15	410.586.196.540,00	88,22
Belanja Hibah	14.428.507.500,00	11.028.750.944,00	76,44
Belanja Bantuan Sosial	6.997.190.000,00	5.927.890.000,00	84,72
Belanja Bagi Hasil	1.944.169.685,00	1.944.169.685,00	100,00
Belanja Bantuan Keuangan	238.806.283.210,00	238.742.597.741,00	99,97
Belanja Tidak Terduga	5.000.000.000,00	5.605.000,00	0,11
BELANJA LANGSUNG	659.757.332.875,00	585.482.011.714,00	88,74
Belanja Pegawai	40.088.082.000,00	31.454.769.700,00	78,46
Belanja Barang dan Jasa	363.039.210.652,00	323.262.406.036,00	89,04
Belanja Modal	256.630.040.223,00	230.764.835.978,00	89,92
SURPLUS/DEFISIT	(168.146.307.260,91)	35.299.519.498,45	(20,99)
PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	171.446.307.260,91	171.446.757.260,91	100,00
SILPA Tahun Anggaran Sebelumnya	171.446.307.260,91	171.446.307.260,91	100,00
Pencairan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	0,00	450.000,00	0,00
Penerimaan Atas Investasi	0,00	0,00	0,00
PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	3.300.000.000,00	3.300.000.000,00	100,00
Penyertaan Modal (Investasi) Pemda	3.300.000.000,00	3.300.000.000,00	100,00
Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	0,00	0,00
PEMBIAYAAN NETTO	168.146.307.260,91	168.146.757.260,91	100,00
SILPA TAHUN BERKENAAN	0,00	203.446.276.759,36	0,00

Ket : Laporan Realisasi APBD Kab. HSU Belum Audit BPK)

Realisasi Pendapatan Daerah pada tahun 2019 adalah sebesar Rp.1.289.016.741.122,45 (*Satu Triliun Dua Ratus Dua Puluh Sembilan Miliar Enam Belas Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Satu Ribu Seratus Dua Puluh Dua Koma Empat Puluh Lima Sen Rupiah*) dari target yang ditetapkan sebesar Rp.1.224.200.343.803,24 (*Satu Triliun Dua Ratus Dua Puluh Empat Miliar Dua Ratus Juta Tiga Ratus Empat Puluh Tiga Ribu Delapan Ratus Tiga Koma Dua Puluh Empat Sen Rupiah*) atau mencapai 105,29% dari target. Sedangkan realisasi belanja untuk Tahun Anggaran 2019 adalah sebesar Rp.1.253.717.221.624,- (*Satu Triliun Dua Ratus Lima Puluh Tiga Miliar Tujuh Ratus Tujuh Belas Juta Dua Ratus Dua Puluh Satu Ribu Enam Ratus Dua Puluh Empat Rupiah*) dari jumlah Belanja Daerah yang dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2019 yaitu sebesar Rp.1.392.346.651.064,15,- (*Satu Triliun Tiga Ratus Sembilan Puluh Dua Miliar Tiga Ratus Empat Puluh Enam Juta Enam Ratus Lima Puluh Satu Ribu Enam Puluh Empat Koma Lima Belas Sen Rupiah*) yang dengan kata lain kita telah berhasil melakukan efisiensi anggaran pada tahun 2019 ini sebesar Rp.138.629.429.440,15 (*Seratus Tiga Puluh Delapan Miliar Enam Ratus Dua Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Dua Puluh Sembilan Ribu Empat Ratus Empat Puluh Koma Lima Belas Sen Rupiah*). Dalam pengelolaan pendapatan dan belanja daerah telah dilaksanakan beberapa kebijakan diantaranya adalah dilaksanakan upaya intensifikasi dan

ekstensifikasi pendapatan daerah. Sedangkan belanja daerah dilaksanakan berdasarkan arah dan kebijakan umum anggaran dengan memperhatikan skala prioritas kebutuhan yang mendesak dan bersifat strategis dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah diselenggarakan dengan tertib, taat pada aturan, efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan dan manfaat bagi masyarakat. Program-program dan kegiatan pada pengeluaran / belanja daerah juga bertujuan mendorong tercapainya anggaran kinerja yang terukur dengan jelas dalam implementasinya.

Demikianlah RLPPD ini disampaikan kepada masyarakat luas dan dalam kesempatan ini kami ingin mengucapkan terima kasih kepada masyarakat Kabupaten Hulu Sungai Utara, DPRD Kabupaten Hulu Sungai Utara, Forkopimda dan seluruh OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara atas dukungan dan kerjasamanya sehingga Kabupaten Hulu Sungai Utara meraih beberapa keberhasilan di tahun 2019 diantaranya adalah :

- 1) Penghargaan Peningkatan Kinerja Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup Wilayah Kabupaten/Kota Periode 2017-2018;
- 2) SAKIP AWARD 2018;
- 3) Terbaik II Tingkat Nasional Penataan dan Pengelolaan Arsip;
- 4) Penghargaan Opini Wajar Tanpa Pengecualian Atas Laporan Hasil Pemeriksaan Keuangan Pemda Tahun Anggaran 2018;
- 5) Penghargaan Kabupaten Layak Anak (KLA) TK. Madya;
- 6) Penghargaan Sebagai Kabupaten Paling Inovatif Dalam Kategori Kinerja Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Konvergensi Intervensi Penurunan Stunting Di Propinsi Kalimantan Selatan Tahun 2019;
- 7) Penghargaan Terbaik II Penilaian Pelaksanaan Konvergensi Intervensi Penurunan Stunting Terintegrasi Di Propinsi Kalsel;
- 8) Juara I TK Nasional lomba Budaya Mutu (LBM) Sekolah Kategori Pembelajaran (SDN Murung Sari 2);
- 9) Terbaik II Pemda Pengelola DAK Fisik & Dana Desa;
- 10) Pengolah Data Kinerja Terbaik Program Satu Data Kelautan dan Perikanan Tahun 2019 dari Kapusdatin Kementerian Kelautan dan Perikanan RI;

11) Penghargaan Pelopor Ruang Bermain Ramah Anak Tahun 2019 oleh Menteri PPPA RI.

